



**PEMERINTAH
KABUPATEN MADIUN**

LKJIP

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
TAHUN ANGGARAN 2020**

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MADIUN
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Ridho-Nya, sehingga dapat disusun Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun.

Penyusunan Laporan Kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun antara lain berdasar pada :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Perubahan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Madiun.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun Tahun 2019 – 2023.
8. Peraturan Bupati Madiun Nomor 66 Tahun 2019 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi Dan Informatika.

Laporan Kinerja ini disusun sebagai wujud pertanggung jawaban Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun dalam melaksanakan tugas pembangunan dan juga untuk dapat memberikan informasi dan arahan kepada Organisasi untuk mengembangkan pengukuran terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian misi atau tujuan yang telah ditetapkan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Madiun Tahun 2020.

Semoga Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun ini dapat bermanfaat bagi kesuksesan program Pemerintah Kabupaten Madiun pada umumnya dan Dinas Komunikasi Dan Informatika pada khususnya.

Madiun,

2021

KEPALA DINAS INFORMATIKA DAN KOMUNIKASI
KABUPATEN MADIUN



Drs. SAWUNG REHTOMO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19700825 199003 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI.....	li
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Gambaran Umum Organisasi	2
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis	9
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2019	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Pengukuran Capaian Kinerja.....	17
3.2 Analisis Capaian Kinerja.....	17
3.3 Akuntabilitas Keuangan.....	35
3.4 Efisiensi	35
BAB IV PENUTUP	36
LAMPIRAN	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pembangunan di Wilayah Kabupaten Madiun telah berkembang dengan pesatnya, terutama di wilayah Kecamatan Mejayan pusat Pemerintahan Kabupaten Madiun. Hal ini perlu didukung dengan sistem perencanaan komunikasi yang baik guna mewujudkan sarana prasarana informasi yang memadai. Dengan sarana prasarana informasi yang memadai akan mampu meningkatkan daya saing daerah dan menuju tercapainya tujuan pembangunan yang ditetapkan. Pemerintah Kabupaten Madiun dalam hal ini Dinas Komunikasi Dan Informatika sebagai instansi yang membidangi urusan Komunikasi dan Informasi dimana salah satu tujuannya adalah menyediakan sistem keterbukaan informasi bagi masyarakat di Wilayah Kabupaten Madiun, menuangkan rencana kerja yang hendak dicapainya ke dalam rencana strategis yang akan menjadi acuan dalam pencapaian kinerja dan pedoman dalam pelaksanaan tanggung jawab yang diemban sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Dinas Komunikasi Dan Informatika dalam melaksanakan tanggung jawabnya tidak terlepas dari kebijakan daerah yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Madiun dan arah kebijakan nasional bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, bidang persandian dan bidang aplikasi dimana secara nasional diterangkan bahwa jasa komunikasi dan informasi memiliki pengertian sebagai bagian integral dari sendi kehidupan masyarakat bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten Madiun diuraikan bahwa penyelenggaraan sarana prasarana komunikasi dan informasi sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan daya saing daerah, dimana dengan sistem komunikasi dan informasi yang baik akan meningkatkan kelancaran berkomunikasi yang selanjutnya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Wilayah Kabupaten Madiun pada umumnya. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun sesuai dengan UU. No : 23 Tahun 2014 mengemban 3 (tiga) Urusan yaitu :

1. Urusan Komunikasi Dan Informatika;
2. Urusan Statistik dan;
3. Urusan Persandian

Pada Tahun Anggaran 2020 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun telah menetapkan tujuan dan sasaran sebagaimana tertuang, sedangkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut, Dinas Komunikasi Dan Informatika mempunyai 5 (enam) Program yaitu :

1. Program Pelayanan Kesekretariatan ;
2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
3. Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik daerah;
4. Program Tata Kelola E Government dan Insfrastruktur Jaringan TI dan Komunikasi;
5. Program Penyelenggaraan Persandian dan Pengamanan Informasi.

Untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan Kewenangan Daerah di bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun yang diberikan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Dalam melaksanakan tugas pokok sehari-hari, Kepala Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Madiun dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris, 4 (empat) Kepala Bidang, 3 (tiga) Kepala Sub Bagian, 10 (sepuluh) Kepala Seksi, dan 24 (dua puluh empat) Staf Pelaksana.

Kendala-kendala yang dihadapi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran adalah :

1. Sarana dan prasarana kantor belum dapat memenuhi tuntutan dalam kelancaran pelaksanaan tugas.
2. Sumber Daya Manusia masih kurang (khususnya tenaga ahli di bidang IT).

Langkah-langkah dan kebijakan yang diambil untuk mengantisipasi / mengatasi permasalahan tersebut antara lain :

1. Meningkatkan kinerja aparatur sesuai tupoksi.
2. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait

Demikian sekilas pelaksanaan program dan kegiatan yang disajikan dalam Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Good Governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara.

Salah satu tuntutan public dewasa ini adalah adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Muara tuntutan ini pada intinya adalah terselenggaranya pemerintahan yang baik (Good Governance), sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaporan Kinerja, Perjanjian Kinerja Dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsure penyelenggara Negara mulai dari eselon II keatas untuk mempertanggungjawabkan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan padanya berdasarkan perencanaan strategik yang dirumuskan sebelumnya.

Untuk mengukur kinerja atau keberhasilan suatu pembangunan maka seluruh kegiatan dinas Tahun Anggaran 2020 perlu diketahui tingkat relevansi, efesiensi dan efektifitasnya, manfaat dan dampak yang ditimbulkannya.

Evaluasi pembangunan juga dimaksudkan untuk menyempurnakan setiap kegiatan pada tahun berikutnya dan membantu perencana dalam penyusunan program di masa mendatang.

Pembangunan Kabupaten Madiun merupakan bagian integral dari pembangunan Daerah Propinsi Jawa Timur serta pembangunan nasional, sesuai dengan yang diamanatkan Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Dalam perencanaan pembangunan nasional, pembangunan bidang komunikasi masih menjadi prioritas utama. Oleh karena itu pembangunan komunikasi harus merupakan usaha yang terpadu dengan pembangunan daerah dan perdesaan. Dengan demikian sector komunikasi dituntut untuk tumbuh dan berkembang dengan laju yang cukup tinggi sekaligus harus memecahkan permasalahan ekonomi nasional seperti penyediaan informasi,

internet desa, informasi dalam peningkatan penerimaan devisa, informasi lapangan kerja dan informasi peningkatan penanggulangan kemiskinan.

Pembangunan sector komunikasi dan informatika dalam arti luas dilaksanakan melalui usaha-usaha intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi. Tujuan pembangunan komunikasi dan informatika bukan saja untuk meningkatkan komunikasi dan informatika yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan informasi, melainkan juga untuk meningkatkan pengetahuan sebagian terbesar rakyat dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat rakyat pedesaan, serta untuk menjadikan komunikasi dan informatika semakin kuat guna mendukung pembangunan di sector komunikasi dan informatika.

Pengelolaan potensi sumberdaya komunikasi dan informatika tidak lagi hanya mengandalkan peningkatan sarana dan prasarana akan tetapi juga dikelola berorientasi kepada kebutuhan.

Dengan ketersediaan anggaran dan berbagai fasilitas yang menunjang pelaksanaantugas, maka perlu diperhatikan tingkat akuntabilitas dan kinerja dinas, yang disusun dalam Laporan Kinerja Pemerintah (LKJiP).. Penyusunan LKJiP Dinas dimaksudkan sebagai kewajiban Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019. Serta sebagai umpan balik untuk memacu perbaikan kinerja dinas di tahun mendatang.

1.2 Gambaran Umum Organisasi

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2019 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun, yang merupakan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun, telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana termuat dalam Peraturan Bupati Madiun Nomor 66 Tahun 2019 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun, maka Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas untuk:

“Perumusan kebijakan daerah di bidang informasi dan komunikasi publik, bidang statistik, dan bidang persandian dan keamanan informasi. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang komunikasi dan

informatika, bidang statistik, dan bidang persandian. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian. Pelaksanaan administrasi dinas daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian. Dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya“.

Untuk menjalankan tugas tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian;
- b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian;
- d. pelaksanaan administrasi dinas Daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Struktur kelembagaan atau organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Madiun sebagaimana tertera dalam Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 66 Tahun 2019 tentang kedudukan susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun, terdiri dari :

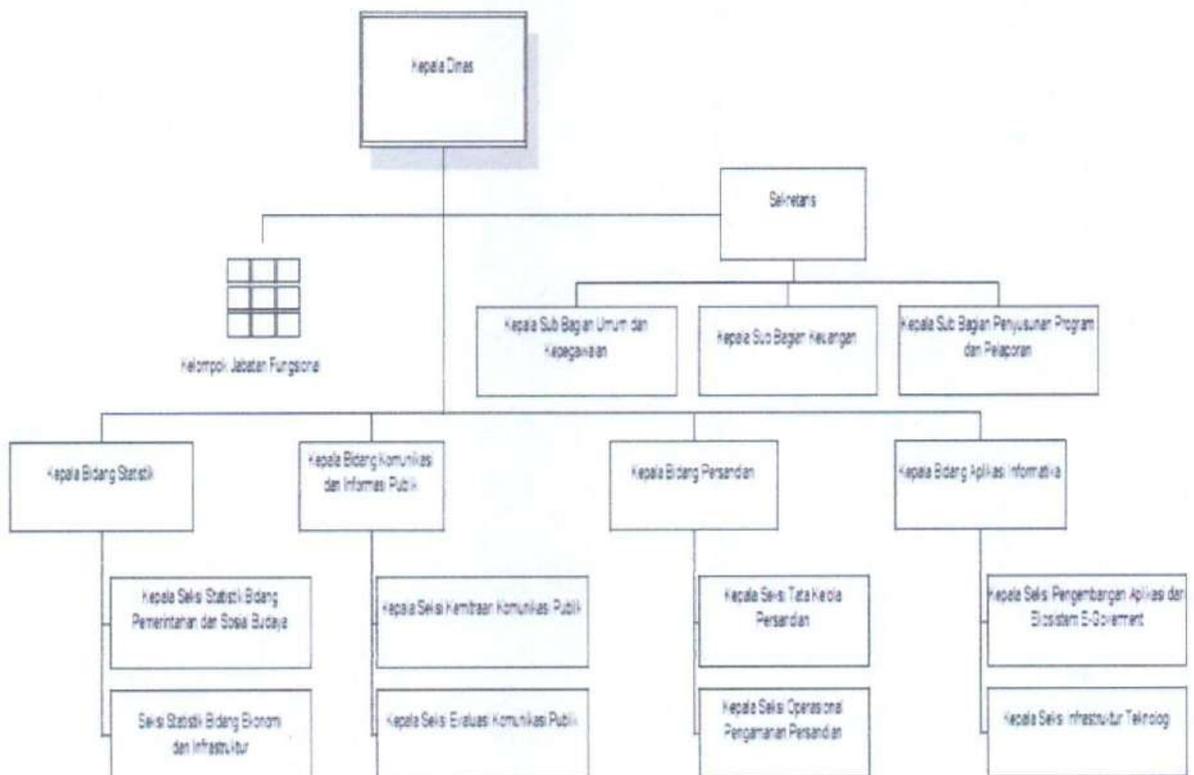
- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.
- 3) Bidang Statistik :
 - a. Seksi pengumpulan, pengolahan dan analisis data; dan
 - b. Seksi Penyajian, Evaluasi dan Pelaporan Data;
- 4) Bidang Persandian :
 - a. Seksi Tata Kelola Persandian; dan
 - b. Seksi Keamanan Informasi;
- 5) Bidang Informasi dan Komunikasi Publik:
 - a. Seksi Kemitraan dan Komunikasi Publik;
 - b. Seksi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik;
 - c. Seksi Media Publik.

- 6) Bidang Aplikasi Informatika :
 - a. Seksi Tatakelola dan Ekosistem E-Government.
 - b. Seksi Pengembangan Aplikasi; dan
 - c. Seksi Infrastruktur Jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun selengkapnya diilustrasikan sebagaimana Gambar 1.1 berikutini.

Gambar 1.1.

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun



Dalam kedudukannya sebagai Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun mempunyai tugas: *“Membantu Bupati Madiun dalam menyelenggarakan urusan di bidang Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, bidang Statistik, bidang Persandian, bidang dan bidang Aplikasi Informatika, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”*. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Dinas dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris dan 4 (empat) orang Kepala Bidang.

Secara operasional, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun didukung sumber daya manusia sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Secara rinci data aparatur/ pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun berdasarkan golongan dan pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.

Data Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun menurut Golongan

No	Golongan	Jumlah Pegawai
1	Golongan I	1
2	Golongan II	9
3	Golongan III	28
4	Golongan IV	5
Jumlah		43

Adapun berdasarkan tingkat pendidikannya, Pegawai Negeri Sipil di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun dapat dikelompokkan sebagai berikut :

Tabel 2.

Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun berdasarkan Tingkat Pendidikan sampai dengan 31 Desember 2019

No.	Uraian Pangkat/ Golongan	Pendidikan						Jumlah
		SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	
1.	Juru Muda (Ia)							
	Juru Muda Tingkat I (Ib)							
	Juru (Ic)		1					1
	Juru Tingkat I (Id)							
2.	Pengatur Muda (IIa)							
	Pengatur Muda Tingkat I (IIb)		2	1				3
	Pengatur (IIc)			3	1			4
	Pengatur Tingkat I (IId)			2				2
3.	Penata Muda (IIIa)				1	7		8
	Penata Muda Tingkat I (IIIb)			4		3		7
	Penata (IIIc)					5	1	6
	Penata Tingkat I (IIId)					6	1	7
4.	Pembina (IVa)						4	4
	Pembina Tingkat I (IVb)							
	Pembina Utama Muda (IVc)						1	1
	Pembina Utama Madya (IVd)							
	Pembina Utama (IVe)							
JUMLAH		0	3	10	2	21	7	43

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika

BAB II

RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KINERJA

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada :

1. RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2018 – 2023
2. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2018-2023;
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

2.1. RPJMD Tahun 2018 – 2023

1. Visi

“Terwujudnya Kabupaten Madiun Aman, Mandiri, Sejahtera dan Berakhlak”.

2. Misi

Dengan memperhatikan seluruh aspek, potensi dan dinamika di Kabupaten Madiun dan sebagai penjabaran dari Visi, maka ditetapkan Misi pembangunan Kabupaten Madiun 2018 – 2023 sebagai berikut :

- Misi I : Mewujudkan rasa aman bagi seluruh Masyarakat dan Aparatur Pemerintah Kabupaten Madiun
- Misi II : Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang profesional untuk meningkatkan pelayanan publik
- Misi III : Meningkatkan pembangunan ekonomi yang mandiri berbasis agrobisnis, agroindustri dan pariwisata yang berkelanjutan
- Misi IV : Meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan
- Misi V : Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia dengan meningkatkan kehidupan beragama, menguatkan budaya dan mengedepankan kearifan lokal

2.2. Rencana Strategis

2.1.1. Isu-isu Strategis

1. Terbatasnya sumberdaya manusia yang trampil dan profesional
2. Kurangnya kemampuan mengintegrasikan Sistem Informasi dan Database OPD
3. Kurangnya kemampuan memberdayakan potensi komunikasi masyarakat
4. Belum optimalnya pengembangan aplikasi TIK

2.1.2. Tujuan dan Sasaran

A. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang lebih spesifik dan terukur akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya secara kolektif, yang menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai/diciptakan sesuai tugas dan fungsi organisasi. Tujuan organisasi mempertajam fokus pelaksanaan misi lembaga, meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan aktivitas lembaga dalam melaksanakan misinya.

Dengan mengacu pada visi dan misi Pemerintah Kabupaten Madiun, serta didasarkan pada isu-isu strategis dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun tahun 2018 - 2023, maka ditetapkan tujuan yang ingin dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun yaitu "Implementasi Sistem Pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) pada Pemkab Madiun", dengan indikator tujuan adalah :

- a. Indeks SPBE

B. Sasaran

Adapun Sasaran OPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun yang ingin diwujudkan adalah dengan "Mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)", dengan indikator sasaran sebagai berikut :

- a. Aplikasi eGov OPD yang terintegrasi
- b. Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Berbasis TIK
- c. Persentase Penanganan terhadap Gangguan Cyber

2.3. Indikator Kinerja Utama

Seiring dengan ditetapkannya RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023, maka IKU Dinas Komunikasi dan Informatika juga mengalami perubahan. IKU Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1.
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
Meningkatnya Layanan Informasi dan Komunikasi dalam penyebaran informasi yang akurat	1. Aplikasi eGov OPD yang terintegrasi	1 Aplikasi
	2. Cakupan Pengembangan & Pemberdayaan Kelompok Informasi masyarakat (KIM) Berbasis TIK	15 KIM
	3. Persentase Penanganan terhadap Gangguan Cyber	100 %

Sedangkan untuk mewujudkan visi dan misi, beserta tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, diperlukan penetapan mengenai upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran misi tersebut dalam bentuk strategi dan arah kebijakan yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Madiun tahun 2018 – 2023.

C. Cara Pencapaian Tujuan Dan Sasaran

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai dengan dipertegas adanya arah kebijakan.

1. Meningkatkan diseminasi informasi melalui pendayagunaan media informasi untuk mengurangi kesenjangan informasi
2. Meningkatkan pemberdayaan potensi dan lembaga komunikasi masyarakat dalam menghadapi globalisasi dan keterbukaan informasi
3. Meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan aplikasi TIK dalam rangka mengembangkan muatan e-government dan kualitas pelayanan publik
4. Meningkatkan kualitas pelayanan bidang Komunikasi dan Informatika didukung sarana dan prasarana yang memadai dan SDM professional

Dari ke empat strategi di atas menjadi rumusan untuk mencapai keberhasilan dari suatu program dan kegiatan yang berlandaskan dan berpedoman pada arah kebijakan sebagai berikut :

1. Pengembangan konsep reformasi birokrasi sebagai reformasi administrasi yang terdiri dari elemen regulasi, sumber daya manusia, teknologi informasi dan kontrol masyarakat, untuk menghasilkan pelayanan publik yang lebih jelas tolok ukurnya.
2. Peningkatan efisiensi dan efektivitas ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat pelayanan publik.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan menerapkan strategi dan arah kebijakan, maka Dinas Kominfo Kabupaten Madiun mengklasifikasi dan melakukan identifikasi faktor lingkungan internal dan eksternal sebagai berikut :

Faktor Internal			
No	Kekuatan (<i>Strength</i>)	No	Kelemahan (<i>Weakness</i>)
1	Tersedianya Sumberdaya Manusia yang cukup	1	Terbatasnya sumberdaya manusia yang trampil dan profesional
2	Tersedianya anggaran	2	Kurangnya kemampuan mengintegrasikan Sistem Informasi dan Database SKPD
3	Tersedianya sarana prasarana yang memadai	3	Kurangnya kemampuan memberdayakan potensi komunikasi masyarakat
4	Tersedianya tupoksi yang mendukung penyebaran informasi, pengembangan TIK, Pos dan telekomunikasi	4	Belum optimalnya pengembangan aplikasi TIK
Faktor Eksternal			
No	Peluang (<i>Opportunities</i>)	No	Ancaman (<i>Threats</i>)
1.	Kepedulian pimpinan terhadap bidang kominfo	1.	Globalisasi informasi yang berdampak pada keterbukaan informasi publik
2.	Tersedianya media informasi dan komunikasi untuk didayagunakan	2.	Kesenjangan informasi di masyarakat
3.	Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik	3.	Pesatnya perkembangan TIK
4.	Kebutuhan pengembangan muatan e-Government	4.	Ketersediaan Infrastruktur TIK yang belum merata
5.	Kesadaran masyarakat akan	5.	Terbatasnya pemahaman aparatur

	pentingnya informasi		dan masyarakat terhadap TIK
6.	Kebutuhan pengembangan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan	6.	Bentuk kelembagaan Kominfo di daerah yang beragam
7.	Tersedianya perundangan yang mendasari regulasi bidang Kominfo	7.	

Tabel 2.2

Penentuan Strategi Pencapaian Indikator Sasaran Dinas Kominfo Kabupaten Madiun
Analisis SWOT

Faktor Eksternal	Peluang :	Tantangan:
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepedulian pimpinan terhadap bidang kominfo 2. Tersedianya media informasi dan komunikasi untuk didayagunakan 3. Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik 4. Kebutuhan pengembangan muatan e-Government 5. Kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi 6. Kebutuhan pengembangan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan 7. Tersedianya perundangan yang mendasari regulasi bidang Kominfo 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Globalisasi informasi yang berdampak pada keterbukaan informasi publik 2. Kesenjangan informasi di masyarakat 3. Pesatnya perkembangan TIK 4. Ketersediaan Infrastruktur TIK yang belum merata 5. Terbatasnya pemahaman aparatur dan masyarakat terhadap TIK 6. Bentuk kelembagaan Kominfo di daerah yang beragam
Faktor Internal		

Kekuatan :	Alternatif Strategi :	Alternatif Strategi :		
Tersedianya Sumberdaya Manusia yang cukup	1. Mengembangkan pendayagunaan media informasi melalui peningkatan kualitas SDM	1. Meningkatkan kemampuan mengintegrasikan Sistem Informasi dalam mendukung pendayagunaan media informasi		
Tersedianya anggaran				
Tersedianya sarana prasarana yang memadai	2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang didukung SDM yang cukup	2. Meningkatkan kemampuan mengintegrasikan Sistem Informasi dan Database dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik		
Tersedianya tupoksi yang mendukung penyebaran informasi, pengembangan TIK, Pos dan telekomunikasi				
			3. Meningkatkan pendayagunaan media informasi melalui sarana prasarana secara optimal	3. Memberdayakan potensi komunikasi masyarakat melalui pendayagunaan media informasi
			4. Meningkatkan diseminasi informasi melalui pendayagunaan media informasi untuk mengurangi kesenjangan informasi	4. Meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan aplikasi TIK dalam rangka mengembangkan muatan e-government dan kualitas pelayanan publik
			5. Meningkatkan kualitas pelayanan bidang Pos dan Telekomunikasi didukung sarana dan	5. Memberdayakan potensi komunikasi masyarakat dalam rangka meningkatkan

	prasarana yang memadai dan SDM profesional	kualitas pelayanan publik
Kelemahan:	Alternatif Strategi :	Alternatif Strategi :
1. Terbatasnya sumberdaya manusia yang trampil dan profesional	1. Mengoptimalkan SDM dalam menghadapi Globalisasi informasi	1. Mengembangkan sistem Informasi dalam menghadapi globalisasi yang berdampak pada keterbukaan informasi publik
2. Kurangnya kemampuan mengintegrasikan Sistem Informasi dan Database SKPD	2. Mengembangkan kapasitas SDM aparatur dan masyarakat dalam bidang Kominfo yang siap menghadapi globalisasi dan keterbukaan informasi	2. Meningkatkan pemberdayaan potensi dan lembaga komunikasi masyarakat dalam menghadapi globalisasi dan keterbukaan informasi
3. Kurangnya kemampuan memberdayakan potensi komunikasi masyarakat	3. Meningkatkan kebutuhan SDM untuk mengurangi kesenjangan informasi di masyarakat	3. Meningkatkan kemampuan potensi informasi masyarakat untuk mengurangi kesenjangan informasi
4. Belum optimalnya pengembangan aplikasi TIK	4. Meningkatkan sarana prasarana guna menunjang kebutuhan Globalisasi informasi yang berdampak pada keterbukaan informasi publik	4. Meningkatkan infrastruktur TIK yang menunjang kebutuhan integrasi sistem informasi dan database dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik
	5. Meningkatkan sarana prasarana guna mengurangi kesenjangan informasi di masyarakat	5. Mengoptimalkan kemampuan mengintegrasikan Sistem Informasi guna mengurangi kesenjangan informasi di masyarakat
	6. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk	6. Meningkatkan pemberdayaan potensi informasi

	menunjang operasional Kominfo	masyarakat dalam menghadapi globalisasi informasi
--	-------------------------------	---

Tabel 2.3
Penentuan Strategi

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Strategi
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik	1. Aplikasi e Government yang terintegrasi	<ol style="list-style-type: none"> Menghubungkan OPD di Lingkup Kabupaten Madiun dengan Jaringan Intra Pemerintah Kab. Madiun Penerapan sistem layanan berbasis TIK Pemasangan dan Pemeliharaan jaringan internet di Lingkup Pemkab Madiun
		2. Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan KIM Berbasis TIK	<ol style="list-style-type: none"> Membentuk kelembagaan KIM pada tiap desa Mengadakan Bimtek KIM setiap tahun
		3. Persentase Penanganan terhadap Gangguan Cyber	<ol style="list-style-type: none"> Menyusun Kebijakan Persandian Pengadaan sarana prasarana persandian Melakukan pelatihan CISRT

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja dimaksud dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja. Penghitungan prosentase pencapaian kinerja tersebut adalah :

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA	KODE
1	100% ≤	Tercapai Target	
2	≤ 100	Tidak Tercapai Target	

Pengukuran Kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan dalam rangka mencapai visi misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun. Pengukuran Kinerja Sasaran (PKS) Tahun 2019 sesuai dengan masing-masing sasaran dan indikator kinerja seperti tercantum di bawah ini.

Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja Tahun 2020

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Aplikasi eGov yang terintegrasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	100 %	Program tatakelola e-government dan infrastruktur jaringan dan komunikasi	Persentase OPD yang telah mengimplemen tasikan TIK dengan baik	19 %	19%	100%
	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Berbasis TIK	15 KIM	9 KIM	60%	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Informasi yang dipublikasikan melalui media elektronik	250 berita	600 berita	240%
	Persentase Penanganan terhadap Gangguan Cyber	100%	100%	100 %	Program Penyelenggaraan Persandian dan Pengamanan Informasi	Persentase OPD yang telah melakukan pengklasifikasian informasi	47,54 %	25%	90%

3.2. Analisa capaian kinerja

Analisa dan evaluasi kinerja diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan kinerja yang pada akhirnya dapat disimpulkan adanya masalah kinerja sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen untuk meningkatkan kinerja melalui alokasi, distribusi dan regulasi. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang didalamnya terdapat beberapa Sub Pelaksana baik setingkat Bidang maupun Seksi sebagai pelaksana program dan kegiatan maka segala pencapaian komponen Renstra tidak dapat dilepaskan dengan tugas dan fungsi masing-masing Sub Pelaksana Program dan Kegiatan sesuai dengan tingkat kewenangan yang diberikan.

3.2.1. Kinerja Bidang Aplikasi Informatika

Aplikasi informatika atau e-Government adalah merupakan prioritas utama bagi pemerintah daerah, karena dengan penggunaan teknologi informasi maka pemerintah daerah mampu memberikan transparansi informasi dan pelayanan publik yang lebih baik. Dengan e-Government akan mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, menciptakan kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik.

Secara kelembagaan Bidang Aplikasi Informatika bertugas menyusun kebijakan teknis, merencanakan program, menyelenggarakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang Tata Kelola dan ekosistem E-Government, Pengembangan Aplikasi serta Infrastruktur Jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Tabel 3.3 Pengukuran Kinerja Bidang Aplikasi Informatika Tahun 2020

SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN 2020 TERHADAP TARGET 2023 (%)
Mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Aplikasi eGov yang terintegrasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	100 %	5 Aplikasi	20 %
Program tatakelola e-government dan infrastruktur jaringan dan komunikasi	Persentase OPD yang telah mengimplemen tasikan TIK dengan baik	19%	19%	100%	100%	19%

Kinerja sasaran dan program tersebut sangat didukung oleh kinerja kegiatan sbb :

Tabel 3.4 Pengukuran Kinerja Kegiatan Bidang Aplikasi dan Informatika Tahun 2020

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAI AN %	TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN 2019 TERHADAP TARGET 2023 (%)
Penguatan Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi	Jumlah kebijakan yang tersusun	1	1	100%	1	100 %
	Jumlah Aplikasi e- Gov yang dikembangkan	3 Apl	11 Apl	366%	91 Apl	86,81 %
	Jumlah Desa / Kelurahan yang dilatih dalam pemanfaatan TIK	15 desa/kel	15 desa/kel	100%	15 desa/kel	100 %
	Jumlah OPD yang dilatih dalam pemanfaatan TIK	53 opd	53 opd	100%	53 opd	100 %
Pengelolaan Infrastruktur Jaringan dan sarana Prasarana Teknologi Informasi	Jumlah jaringan internet dan sarpas TI yang terpasang dan terpelihara	53 titik	53 titik	100%	53 titik	100 %
	Jumlah OPD yang terhubung melalui jaringan intra pemerintah kab madiun	36 opd	29 opd	91%	36 opd	100%

Program Tata Kelola E-Government dan Infrastruktur Jaringan TI dan Komunikasi

Jumlah anggaran sebesar Rp. 3.526.449.353,00 terealisasi sebesar Rp. 3.504.101.189,00 atau 99,37 % dengan Indikator Kinerja persentase OPD yang telah mengimplementasikan TIK dengan baik :

Target 19 % (10 OPD) realisasi 19% (10 OPD) antara lain :

a. Kegiatan Penguatan Tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi

- Jumlah anggaran sebesar Rp. 73.908.200,00 terealisasi sebesar Rp. 73.600.000,00 atau 99,58 % dengan Indikator Kinerja :
- Jumlah kebijakan yang tersusun target 1 kebijakan, realisasi 2 kebijakan atau yaitu kebijakan yang mendukung Tata Kelola E-Government berupa Perbup SPBE Pemerintah Daerah

b. Pengelolaan Infrastruktur Jaringan dan Sarana prasarana Teknologi Informasi

Jumlah anggaran sebesar Rp. 1.306.090.779,00 terealisasi sebesar Rp. 1.301.380.916,00 atau 99,64 % dengan Indikator Kinerja Jumlah jaringan internet dan sapsras TI yang terpasang dan terpelihara, target 53 titik dan tercapai 53 titik atau 100%
Dipergunakan untuk :

- Jumlah jaringan internet dan sapsras TI yang terpasang dan terpelihara, target 53 titik realisasi 53 titik atau 100 %,
Dipergunakan untuk :
 - Pembayaran biaya Internet di semua OPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Madiun;
 - Pemeliharaan Jaringan dan Ruang Server;
 - Pelayanan SMS terpadu;
 - Sejumlah perangkat daerah yang terhubung jaringan intra Pemerintah Kabupaten Madiun

c. Pengelolaan Infrastruktur Jaringan dan Prasarana Teknologi Informasi (COVID19-New Normal)

Jumlah Anggaran Rp. 1.623.324.229,00 terealisasi Rp. 1.610.356.273,00, capaian persentase 99,20%;
Digunakan untuk:

- Pengembangan kapasitas SDM di bidang Tehnologi Informasi dan Komunikasi sejumlah 6 orang
- Sejumlah 43 Perangkat Daerah yang menggunakan Sub Domain Pemerintah Daerah

d. Pengembangan Aplikasi

Jumlah Anggaran Rp. 523.126.145,00 terealisasi Rp. 518.764.000,00, capaian persentase 99,17%;

- Belanja jasa tenaga ahli.
- Jumlah Aplikasi yang dikembangkan dengan Target 3 aplikasi dan tercapai 11 aplikasi
- Jumlah Desa / Kelurahan yang dilatih dalam pemanfaatan TIK, Target 15 Desa/Kelurahan realisasi 15 Desa/Kelurahan atau 100 %,

3.2.2. Kinerja Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Secara kelembagaan tugas Bidang Informasi dan Komunikasi Publik adalah menyusun kebijakan teknis, merencanakan program, menyelenggarakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang Kemitraan dan Komunikasi Publik, Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik serta Media Publik.

Tabel 3.5. Pengukuran Kinerja Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Tahun 2020

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Berbasis TIK	15 KIM	9 KIM	60%	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Informasi yang dipublikasikan melalui media elektronik	250 berita	600 berita	240%

Kinerja sasaran dan program tersebut sangat didukung oleh kinerja kegiatan sbb :

Tabel 3.6. Pengukuran Kinerja Kegiatan Bidang Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Tahun 2020

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN 2020 TERHADAP TARGET 2023 (%)
Penyelenggaraan Kemitraan Komunikasi Publik	Jumlah informasi pemerintah daerah yang dipublikasi advertorial pada media masa	150 berita (ADV)	40 berita (ADV)	27%	150 berita (ADV)	27%
	Jumlah wartawan yang ikut desiminasi	100 org	100 org	100%	100 org	100%
Penyelenggaraan LPPL Radio Puroboyo FM	Jumlah dokumen yang tersusun	1 dok	3 dok	300%	1 dok	300%
	Jumlah dialog	10 kali	4 kali	40%	10 kali	40%

	interaktif					
Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik	Jumlah kebijakan PPID yang tersusun					
	Jumlah KIM yang dibina	15 KIM	9 KIM	60%	60 KIM	15 %

Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

- Jumlah anggaran sebesar Rp. 483.950.269,50 terealisasi sebesar Rp480.570.123,00 atau 99,30 % dengan Indikator Kinerja :

a. Kegiatan Penyelenggaraan Kemitraan Komunikasi Publik

Jumlah anggaran sebesar Rp. 103.057.269,50 terealisasi sebesar Rp. 102.286.500,00 atau 99,25 % dengan Indikator Kinerja :

- Jumlah informasi pemerintah daerah yang dipublikasi advertorial pada media masa target 150 berita (ADV) realisasi 40 berita (ADV).
- Jumlah wartawan yang ikut desiminasi target 100 orang realisasi 100 orang atau 100 %
- Jumlah informasi yang di publikasikan melalui media masa Target 300 informasi realisasi 600 informasi atau 100 %,

b. Kegiatan Penyelenggaraan LPPL Radio Puroboyo FM

- Jumlah anggaran sebesar Rp. 189.075.000,00 terealisasi sebesar Rp.188.351.745,00 atau 99,61 % dengan Indikator Kinerja :
- Jumlah dokumen yang tersusun target 1 dokumen realisasi 3 dokumen atau 300 %, dalam bentuk Dokumen Kerangka Rencana Kabupaten, Nomor Ijin Berusaha dan dokumen KLHS.
- Jumlah dialog interaktif target 10 kali realisasi 4 kali atau , dipergunakan untuk dialog interaktif tentang informasi Pemerintah Daerah oleh OPD terkait

c. Kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

- Jumlah anggaran sebesar Rp. 108.930.000,00 terealisasi sebesar Rp. 107.574.400,00 atau 98,76 % dengan Indikator Kinerja :
- Jumlah pembinaan KIM yang dilaksanakan target 15 KIM realisasi 9 KIM atau 60 %.
- Melaksanakan sosialisasi tentang KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) sebanyak 2 kali

- Pembelian alat pengeras suara di 14 titik yaitu di Taman Asti 2 titik, Alun-alun Rekso Gati 7 titik, Pasar Dungus 2 titik, Pasar Dagangan 1 titik, Ruang Terbuka Hijau Dolopo 2 titik.

d. Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Jumlah anggaran sebesar Rp. 82.888.000,00 terealisasi sebesar Rp. 82.367.478,00 atau 99,37 % dengan Indikator Kinerja :

- Jumlah informasi melalui media luar ruang target 52 buah realisasi 36 buah atau 69%.
- Cetak keiender target 1.850 eksemplar terealisasi 1.725 eksemplar atau 93%

Permasalahan

- Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki Kompetensi teknis di bidang Persandian khususnya Sandiman
- Keahlian Sumber Daya Manusia di bidang Persandian terbatas
- Keterbatasan jumlah SDM yang memiliki kompetensi teknis di bidang TIK pada Diskominfo khususnya dan di semua OPD pada umumnya;
- Masih minimnya sarana prasarana di bidang TIK dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Masih terkendalanya masalah perijinan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Puruboyo FM.

Solusi

- Perekrutan atau Pengadaan ASN yang mempunyai basic di bidang Persandian (Sandiman)
- Perlu Dilakukan Pelatihan Sumber Daya Manusia Di bidang Persandian (Sandiman).
- Menyusun program – program pelatihan bagi ASN, yang difokuskan pada peningkatan kemampuan di bidang teknologi informasi (IT) untuk ASN di lingkup Diskominfo dan semua OPD;
- Membangun kemitraan dengan pihak non pemerintah dalam peningkatan kompetensi teknis ASN, serta penyediaan tenaga ahli di bidang TIK;
- Penambahan anggaran untuk peningkatan kualitas SDM dan TIK.

- Percepatan proses perijinan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Puruboyo FM dan menyesuaikan dengan prosedur yang berlaku.

3.2.3. Kinerja Bidang Persandian dan Keamanan Informasi

Peran persandian dan keamanan informasi berada, sebagai entitas pengaman informasi. Persandian harus mampu memberi jaminan keamanan informasi di lingkup Pemerintah Daerah.

Secara kelembagaan tugas Bidang Persandian dan Keamanan Informasi yaitu menyusun kebijakan teknis, merencanakan program, menyelenggarakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang Tata Kelola Persandian dan Keamanan Informasi

Tabel 3.7 Pengukuran Kinerja Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Tahun 2020

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Mewujudkan Sistem Pemerintahan yang Berbasis Elektronik (SPBE)	Persentase Penanganan terhadap Gangguan Cyber	100	100	100 %	Program Penyelenggaraan Persandian dan Pengamanan Informasi	Persentase OPD yang telah melakukan pengklasifikasian informasi	47,54 %	45%	95%

Kinerja sasaran dan program tersebut sangat didukung oleh kinerja kegiatan sbb :

Tabel 3.8. Pengukuran Kinerja Kegiatan Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Tahun 2020

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN 2020 TERHADAP TARGET 2023 (%)
Penyusunan Perencanaan, Kebijakan dan Pedoman Penyelenggara	Jumlah Kebijakan yang disusun	1 dok	2 dok	100 %	-	-

n Persandian untuk Pengamanan Informasi						
Pengelolaan Sumber Daya Persandian Meliputi SDM Materiil Sandi dan Klasifikasi Informasi	Jumlah OPD yang sudah melakukan pengklasifikasi n informasi	53 OPD	24 OPD	45,2 %,	-	-
Operasional Pengaman Informasi Persandian dan Jaring Komunikasi Sandi	Jumlah Kebijakan yang disusun	1 Dok	2 Dok	100%	1 Dok	2 Dok
	Jumlah sosialisasi yang terlaksana	1 kali	1 kali	100%	1 kali	1 kali

Program Penyelenggaraan Persandian dan Pengamanan Informasi.

Jumlah anggaran sebesar Rp. 88.138.958,00 terelalisasi sebesar Rp. 86.998.058,00 atau 98,71% dengan indikator kinerja : Persentase OPD yang sudah melakukan pengklasifikasian informasi target 47,54 % realisasi 25,5 %

a. Kegiatan Penyusunan Kebijakan Persandian

Jumlah anggaran sebesar Rp. 36.261.158,00 terealisasi sebesar Rp. 36.213.158,00 atau 99,87 %, dengan Indikator Kinerja :

- Jumlah Kebijakan yang disusun target 1dok relisasi 2 dok

b. Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Persandian

- Jumlah anggaran sebesar Rp. 38.832.800,- terealisasi sebesar Rp. 38.004.900,- atau 97,87% dengan Indikator Kinerja
- Jumlah OPD yang sudah melakukan pengklasifikasian informasi target 53 OPD realisasi 24 OPD atau 45,2 %, antara lain Bagian Umum, Bagian Organisasi, Badan Kesbangpoldagri, Dinas Perhubungan, BPKAD, Kec. Sawahan, Kec. Kare, Kelurahan Pandean, Kelurahan Wungu, PDAM, PD Umbul SQ.
- Tersedianya Alat Komunikasi Sandi yang berbasis Radio HT sejumlah 7 unit

c. Kegiatan Operasional Pengamanan Informasi Persandian

Jumlah anggaran sebesar Rp. 7.945.000,00,- realisasi sebesar Rp. 7.680.000,00,- atau 96,66% dengan Indikator Kinerja :

- Perangkat Daerah yang dinilai melalui IT security Assesment sebanyak 2 PD

d. Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Persandian (COVID19-New Normal)

Jumlah anggaran sebesar Rp. 5.100.000,00 Sosialisasi tandatangan Digital

3.2.4. Kinerja Bidang Statistik

Dalam Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019, Statistik adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis sebagai sistem yang mengatur keterkaitan atas unsur dan penyelenggaraan statistik.

Secara kelembagaan Bidang Statistik mempunyai tugas menyusun kebijakan teknis, merencanakan program, menyelenggarakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang pengumpulan, pengolahan dan analisis data dan Penyajian, Evaluasi dan Pelaporan Data.

Tabel 3.9 Pengukuran Kinerja Bidang Statistik Tahun 2020

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TAHUN 2020		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
Program Pengembangan data/ informasi/ statistik daerah	Persentase data statistik sektoral yang tersedia dan valid	80%	85%	106%

Kinerja program tersebut sangat didukung oleh kinerja kegiatan sbb :

Tabel 3.10. Pengukuran Kinerja Kegiatan Bidang Statistik Tahun 2020

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN 2020 TERHADAP TARGET 2023 (%)
Kompilasi Data Statistik Sektoral	jumlah dokumen statistik sektoral	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %		
Pengembangan Pusat Data Statistik Sektoral	Jumlah dokumen yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %		
	Jumlah peserta pelatihan	75 orang	75 orang	100%		
Penyusunan Data Statistik Kewilayahan	Dokumen yang tersusun	5 Dokumen	4 Dokumen	100%		

Kegiatan Forum Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Statistik Sektoral	Jumlah Data Dashboard yang tersedia	36 sektor	36 sektor	100%		
--	-------------------------------------	-----------	-----------	------	--	--

Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah

Jumlah anggaran sebesar Rp. 159.395.176,00 terealisasi sebesar Rp. 159.254.280,00 atau 99,91% dengan indikator kinerja :

- Persentase Data Statistik Sektoral yang tersedia dan valid target 85% dan tercapai 90% atau 113 %

a. Kegiatan Kompilasi Data Statistik Sektoral

Jumlah anggaran sebesar Rp. 10.944.000,00 terealisasi sebesar Rp. 10.943.746,00 atau 99,99% dengan Indikator Kinerja jumlah dokumen statistik sektoral target 1 dokumen (50 buku) tercapai 1 dokumen (50 buku) atau 100%, Dipergunakan untuk penyusunan buku Kompilasi Data Statistik Sektoral

b. Kegiatan Penyusunan Data Statistik Kewilayahan

Jumlah anggaran sebesar Rp. 36.923.500,00 terealisasi sebesar Rp. 36.923.216,00 atau 99,99 % dengan Indikator Kinerja :

Jumlah dokumen yang tersusun target 1 dokumen realisasi 1 dokumen atau 100%,

Dipergunakan untuk penyusunan buku Data Statistik Kewilayahan sebanyak 35 buku dan untuk penggandaan buku :

- Kabupaten Madiun Dalam Angka 75 buku.
- Kecamatan Dalam Angka 75 buku.
- Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 40 buku.
- Buku Saku Kabupaten Dalam Angka 55 buku

c. Kegiatan Pengembangan Pusat Data Statistik Sektoral

Jumlah anggaran sebesar Rp. 67.557.500,00 terealisasi sebesar Rp. 67.517.962,00 atau 99,94 % dengan Indikator Kinerja :

- Jumlah peserta pelatihan target 55 orang, realisasi 75 orang atau 136 %, dipergunakan untuk pelatihan peningkatan SDM pengelola Data Statistik Sektoral
- Dokumen yang tersusun, target 1 Dokumen (25 buku) realisasi 1 Dokumen (25 buku) atau 100 %, dipergunakan untuk penyusunan Buku Pemetaan Kemiskinan.

- Kegiatan Forum Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Statistik Sektoral

Jumlah anggaran sebesar Rp. 43.970.176,00 terealisasi sebesar Rp. 43.869.356,00 atau 99,77 % dengan Indikator Kinerja :

Jumlah dokumen yang tersusun target 1 dokumen realisasi 1 dokumen atau 100%,

Dipergunakan untuk penyusunan buku Data Statistik Kewilayahan sebanyak 35 buku dan untuk penggandaan buku :

- Kabupaten Madiun Dalam Angka 75 buku.
- Kecamatan Dalam Angka 75 buku.
- Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 40 buku.
- Buku Saku Kabupaten Dalam Angka 55 buku

Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab segala mandat yang diberikan kepada pengemban amanat, sedangkan Kinerja diartikan sebagai prestasi kerja pengemban amanat atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Oleh karena itu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun sangat berkepentingan menyampaikan Laporan Kinerja sebagai potret keinginan yang kuat dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun dalam meningkatkan kinerja organisasi.

Selanjutnya analisa dan evaluasi kinerja diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan kinerja yang pada akhirnya dapat disimpulkan adanya masalah kinerja sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen untuk meningkatkan kinerja melalui alokasi, distribusi dan regulasi. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang didalamnya terdapat beberapa Sub Pelaksana baik setingkat Bidang maupun Seksi sebagai pelaksana program dan kegiatan maka segala pencapaian komponen Renstra

tidak dapat dilepaskan dengan tugas dan fungsi masing-masing Sub Pelaksana Program dan Kegiatan sesuai dengan tingkat kewenangan yang diberikan.

Secara garis besar sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2020, telah dapat dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun dengan *performance* kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Meningkatkan kinerja aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun :

Untuk mengukur pencapaian sasaran tersebut ditetapkan indikator persentase kebutuhan operasional kantor yang terpenuhi dan ketersediaan sarana penunjang kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun kondisi baik. Indikator tersebut dimaksudkan untuk mengukur pencapaian sasaran dalam pelaksanaan 7 (tujuh) program dan 39 (tiga puluh sembilan) kegiatan yaitu :

a. Program Pelayanan Kesekretariatan, terdiri dari 2 kegiatan :

- Pelaksanaan Administrasi, Kepegawaian dan Sarana Prasarana ;
- Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Anggaran.

Target capaian kinerja sasaran dengan 5 (lima) indikator tersebut tercapai rata-rata 100%. Berdasarkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran di ketahui bahwa dari target indikator sasaran secara keseluruhan rata-rata sebesar 100% tercapai 92,54%, dengan tingkat capaian kinerja sasaran tercapai 100%. Berdasarkan skala ordinal maka capaian kinerja sasaran termasuk dalam kategori sangat baik. Ketercapaian tersebut didukung oleh adanya ketersediaan anggaran yang cukup dalam melaksanakan program dan kegiatan. Adanya kegiatan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor, yaitu : komputer, laptop, printer dan pengadaan mebeulair sehingga dapat menambah tersedianya sarana dan prasarana kerja, tetapi masih diperlukan lebih banyak penambahan sarana dan prasarana untuk mencukupi kebutuhan guna meningkatkan kelancaran kerja. Selain itu adanya kegiatan penyediaan alat tulis kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan juga mendukung kelancaran dalam administrasi kantor, terutama dalam penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan.

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya, capaian kinerja tahun 2020 sama dengan capaian kinerja tahun 2019, yang juga tercapai 100%. Hal ini dikarenakan anggaran tahun 2020 relatif sama

dengan tahun 2018, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan juga relatif sama.

2. Sasaran 1 : Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Untuk mengukur pencapaian sasaran tersebut ditetapkan indikator yaitu persentase sarana dan penunjang kegiatan. Indikator tersebut dimaksudkan untuk mengukur pencapaian sasaran dalam pelaksanaan 2 (dua) program dan 4 (empat) kegiatan, yaitu:

- a. **Program Penyelenggaraan Persandian dan Pengamanan Informasi, dengan kegiatan sebagai berikut :**

- Operasional Pengamanan Informasi Persandian;
- Penyusunan Kebijakan Persandian;
- Pengelolaan Sumber Daya Persandian;
- Pengelolaan Sumber Daya Persandian (COVID19-NewNormal)

3. Sasaran 2: Tersedianya data statistik Daerah yang akurat dan tepat waktu.

Untuk mengukur pencapaian sasaran tersebut ditetapkan indikator tersedianya Buku Kabupaten Madiun Dalam Angka dan Buku PDRB yang tepat waktu. Indikator tersebut dimaksudkan untuk mengukur pencapaian sasaran dalam pelaksanaan 1 (satu) program dan 3 (tiga) kegiatan, yaitu; **Program Pengembangan data/ informasi/ statistik daerah, terdiri dari kegiatan :**

- Kompilasi data Statistik Sektoral;
- Penyusunan data statistik kewilayahan;
- Pengembangan Data Statistik Sektoral;
- Forum Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Statistik Sektoral;

Target capaian kinerja sasaran dengan indikator tersebut tercapai 100%.

4. Sasaran 3 : Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Melalui Jaringan Komunikasi

Untuk mengukur pencapaian sasaran tersebut ditetapkan indikator Website milik Pemerintah Daerah dan jumlah Website/Blog milik OPD yang aktif. Indikator tersebut dimaksudkan untuk mengukur pencapaian sasaran dalam pelaksanaan 2 (satu) program dan 3 (tiga) kegiatan, yaitu;

Program tatakelola e-government dan infrastruktur jaringan dan komunikasi terdiri dari kegiatan :

- a. Penguatan tatakelola teknologi informasi dan komunikasi;

- b. Pengelolaan infrastruktur jaringan dan sarana prasarana teknologi dan informasi ;
- c. Pengelolaan Infrastruktur Jaringan dan Sarana Prasarana Teknologi Informasi (COVID19-New Normal)
- d. Pengembangan Aplikasi;

6. Sasaran 5 : Melaksanakan Desiminasi Informasi kepada Masyarakat.

Untuk mengukur pencapaian sasaran tersebut ditetapkan indikator jumlah Pertemuan dengan Media Massa dan Media Massa Radio. Indikator tersebut dimaksudkan untuk mengukur pencapaian sasaran dalam pelaksanaan 3 (tiga) program dan 8 (delapan) kegiatan, yaitu; Program Pengembangan Komuniksai, informasi, dan media massa, program Pengelolaan Informasi dan komunikasi publik, terdiri dari kegiatan:

- a. Penyelenggaraan kemitraan komunikasi Publik;
- b. Penyelenggaraan LPPL Radio Puroboyo FM ;
- c. Pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
- d. Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;

1.3. Akuntabilitas Keuangan

NO	URUSAN	ANGGARAN		REALISASI (%)
		TOTAL	REALISASI	
1	2	3	4	5
A	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR			
1	Urusan Statistik	159.395.176,00	159.254.280,00	99,91%
	Program Pengembangan data/ informasi/ statistik daerah			
	a. Kompilasi Data Statistik Sektoral	10.944.000,00	20.400.000,00	100%
	b. Penyusunan Data Statistik Kewilayahan	36.923.500,00	36.923.216,00	100%
	c. Pengembangan Pusat Data Statistik sektoral	67.557.500,00	67.517.962,00	99,09%
	d. Forum Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Statistik Sektoral	43.790.176,00	43.869.356,00	99,94%
2	Urusan Persandian	88.138.958,00	86.998.058,00	98.71%

	Program Penyelenggaraan Persandian dan Pengamanan Informasi			
	a. Penyusunan kebijakan Persandian	36.261.15800	36.213.158,00	99,87%
	b. Pengelolaan sumberdaya Persandian	38.832.800,00	8.004.900,00	97,87%
	c. Operasional pengamanan informasi persandian	7.945.000,00	7.680.000,00	96,66%
	d. Pengelolaan Sumber Daya Persandsian (COVID19-New Normal)	5.100.000,00	5.100.000,00	100%
3	Urusan Komunikasi dan Informatika Program tatakelola e-government dan infrastruktur jaringan dan komunikasi	3.516.449.353,00	3.504.101.189,00	99,37%
	a. Penguatan tatakelola teknologi informasi dan komunikasi;	73.908.200,00	73.600.000,00	99,20%
	b. Pengelolaan infrastruktur jaringan dan sarana prasarana teknologi dan informasi	1.306.090.779,00	1.301.380.916,00	99,64%
	c. Pengembangan Aplikasi	523.126.145,00	518.764.000,00	99,17%
4	Program Pengelolaan Informasi dan komunikasi publik	483.950.269,50	480.570.123,00	99,30%
	a. Penyelenggaraan kemitraan komunikasi Publik;	103.057.269,50	102.286.500,00	99,25%
	b. Penyelenggaraan LPPL Radio Puroboyo FM ;	189.075.000,00	188.341.745,00	99,61%
	c. Pengelolaan dan pelayanan informasi publik;	108.930.000,00	107.574.400,00	98,76%
	d. Penyebarluasan informasi penyelenggaraan	82.888.000,00	82.367.478,00	99,37%

	pemerintahan daerah			
		4.247.933.756,5	4.230.924.027,00	397,6%

3.4 Analisis Efisiensi

Anggaran kinerja mencerminkan beberapa hal. Pertama, maksud dan tujuan permintaan dana. Kedua, biaya dari program-program yang diusulkan dalam mencapai tujuan ini. Dan yang ketiga, data kuantitatif yang dapat mengukur pencapaian serta pekerjaan yang dilaksanakan untuk tiap-tiap program. Penganggaran dengan pendekatan kinerja ini berfokus pada efisiensi penyelenggaraan suatu aktifitas. Efisiensi ini sendiri adalah perbandingan antara output dengan input. Suatu aktifitas dikatakan efisien apabila output yang dihasilkan lebih besar dengan input yang sama, atau output yang dihasilkan lebih besar adalah sama dengan input yang lebih sedikit. Anggaran ini tidak hanya didasarkan pada apa yang dibelanjakan saja, seperti yang terjadi pada sistem anggaran tradisional, tetapi juga didasarkan pada tujuan/rencana tertentu yang pelaksanaannya perlu disusun atau didukung oleh suatu anggaran biaya yang cukup dan penggunaan biaya tersebut harus efektif dan efisien.

Analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan output dan input baik untuk rencana maupun realisasi. Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun apabila membandingkan realisasi kinerja dan realisasi keuangan dapat dikatakan berhasil melakukan efisiensi sebab realisasi kinerja melampaui target kinerja yang telah ditetapkan. Hal analisis efisiensi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel terlampir

BAB IV PENUTUP

Secara umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun pada Tahun 2020 telah melaksanakan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan administrasi umum pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Cerminan dari hasil pelaksanaan tugas tersebut secara operasional telah dapat dilihat dari pelaksanaan program dan kegiatan pada masing-masing Bidang dalam mencapai sasaran. Pencapaian sasaran yang telah ditetapkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun pada tahun 2019 diukur berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Sesuai dengan indikator kinerja sebagai penterjemahan dari Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun Tahun 2019-2023, sasaran yang telah ditetapkan untuk dicapai pada tahun 2020 terdiri 4 (empat) sasaran. Secara umum, pencapaian 5 (lima) sasaran dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun dengan kategori sangat baik. Bila dirinci, dari 8 (delapan) indikator kinerja sasaran yang telah dibuat.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 ini harus akuntabel sehingga diharapkan akan mampu memberikan perubahan yang signifikan terhadap kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun dimasa yang akan datang.

LAMPIRAN

REALISASI KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MADIUN

NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		CAPAIAN		EFISIENSI SUMBER DAYA
			ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR								
1	Urusan Statistik								
	Program Pengembangan data/ informasi/ statistik daerah	• Persentase Data Statistik Sektoral yang tersedia dan valid	159.395.176,00	80 %	159.254.280,00	90,00 %	99,91%	112,50%	12,59
	a. Kompilasi Data Statistik Sektoral	jumlah dokumen statistik sektoral	10.944.000,00	1 dokumen	10.943.000,00	1 dokumen	99,99%	100,00%	0,01
	b. Penyusunan Data Statistik Kewilayahan	Jumlah dokumen yang tersusun	36.923.500,00	5 dokumen	36.923.216,00	4 dokumen	100,00%	80,00%	-20
	c. Pengembangan Pusat Data Statistik sektoral	Jumlah peserta pelatihan	67.557.500,00	55 orang	67.517.962,00	75 orang	99,94%	136,36%	36,42
		Dokumen yang tersusun		1 dokumen		1 dokumen		100,00%	0,06
	d. Forum Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Statistik Sektoral	Jumlah Data Dashboard yang tersedia	43.970.176,00	36 Sektor	43.869.356,00	36 Sektor	99,77%	100,00%	0,23
2	Urusan Persandian								
	Program Penyelenggaraan Persandian dan Pengamanan Informasi	Persentase OPD yang sudah melakukan pengklasifikasian informasi	88.138.958,00	47,54%	86.998.058,00	45,00%	98,71%	94,66%	-4,05
	a. Penyusunan Kebijakan Persandian	Jumlah Kebijakan yang disusun	36.261.158,00	1 dokumen	36.213.158,00	2 dokumen	99,87%	200,00%	100,13

	b. Pengelolaan Sumber Daya Persandian	Jumlah alat komunikasi sandi berbasis Rradio HT yang tersedia	38.823.800,00	6 unit	38.004.900,00	7 unit	97,89%	116,67%	18,78
	c. Operasional pengamanan informasi persandian dan jaring komunikasi sandi;	Jumlah sosialisasi yang terlaksana	7.945.000,00	1 kali	7.680.000,00	1 kali	96,66%	100,00%	3,34
	d. Pengelolaan Sumber Daya Persandian (Covid19 New Normal)	Jumlah peserta sosialisasi CISRT	5.100.000,00	10 orang	5.100.000,00	10 orang	100,00%	100,00%	0
3	Urusan Komunikasi dan Informatika								
	Program tatakelola e-government dan infrastruktur jaringan dan komunikasi	persentase OPD yang telah mengimplementasikan TIK dengan baik	3.526.449.353,00	19 % (10 OPD)	3.504.101.189,00	19,00 % (10 OPD)	99,37%	100,00%	0,63
	a. Penguatan tatakelola teknologi informasi dan komunikasi	• Jumlah kebijakan yang tersusun	73.908.200,00	1 kebijakan	73.600.000,00	2 kebijakan	99,58%	200,00%	100,42
		• Jumlah Aplikasi yang dibangun dan		3 aplikasi		11,00 aplikasi		366,67%	267,09
		• Jumlah Desa / Kelurahan yang		206 desa/kel		206 desa/kel		100,00%	0,42
		• Jumlah OPD yang dilatih dalam		53 OPD		53 OPD		100,00%	0,42
	b. Pengelolaan infrastruktur jaringan dan sarana prasarana teknologi dan informasi	Jumlah jaringan internet dan sapsas TI yang terpasang dan terpelihara	1.306.090.779,00	53 titik	1.301.380.916,00	53 titik	99,64%	100,00%	0,36
		Jumlah OPD yang terhubung melalui jaringan intra pemerintah kab madiun		36 OPD		36 OPD		100,00	0,36
	c. Pengelolaan Infrastruktur Jaringan dan Sarana Prasarana Teknologi Informasi (Covid19-New Normal)	Jumlah Sarana dan prasarana video conference yang tersedia	1.623.324.329,00		1.601.356.273,00		98,65%		

Program Pengelolaan Informasi dan komunikasi publik	Jumlah informasi yang di publikasikan melalui media elektronik	483.950.269,00	250 informasi	480.570.123,00	600 informasi	99,30%	240,00%	140,7
a. Penyelenggaraan kemitraan komunikasi Publik;	Jumlah informasi pemerintah daerah yang dipublikasi advertorial pada media masa	103.057.269,00	150 berita (ADV)	102.285.500,00	40 berita (ADV)	99,25%	26,67%	-72,58
	Jumlah wartawan yang ikut desiminasi		75 orang		75 orang		100,00%	0,75
b. Penyelenggaraan LPPL Radio Puroboyo FM	Jumlah dokumen yang tersusun	189.075.000,00	1 dokumen	188.341.745,00	3 dokumen	99,61%	300,00%	200,39
	Jumlah dialog interaktif		10 kali		4 kali		40,00%	-59,61
	jumlah tenaga penyiar purabaya FM		8 orang		8 orang		100,00%	0,39
c. Pengelolaan dan pelayanan informasi publik;	Jumlah kebijakan PPID yang tersusun	108.930.000,00	1 dokumen	107.574.400,00	1 dokumen	98,76%	100,00%	1,24
	Jumlah KIM yang dibina		15 KIM		9 KIM		60%	-38,76
d. Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Jumlah Media luar ruang	82.888.000,00	50 spanduk, banner, baliho	82.367.478,00	36 spanduk, banner, baliho	99,37%	72,00%	-27,37
	Jumlah cetak kalender		1.850 Kalender		1.725 Kalender		93,24%	-6,13
		4.257.933.756,00		4.230.923.650,00		99,37%		